



## DEMOKRASI DAN PAJAK: MENELUSURI HUBUNGAN DINAMIS ANTARA SISTEM POLITIK DAN MOBILISASI PENDAPATAN

Suparna Wijaya <sup>1)</sup>, Iin Rosini <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> [suparnawijaya@upnvj.ac.id](mailto:suparnawijaya@upnvj.ac.id), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

<sup>2)</sup> [dosen00014@unpam.ac.id](mailto:dosen00014@unpam.ac.id), Universitas Pamulang

### Abstract

*This study aims to examine the relationship between democratic systems and tax revenue through a Systematic Literature Review (SLR) approach. Democratization is assumed to have implications for tax compliance, fiscal accountability, and legitimacy of tax policies, which ultimately affect total tax revenue. The SLR was conducted by analyzing 47 scientific articles published in Scopus and Web of Science indexed journals during the 2010-2024 period. The results show that there is a significant positive relationship between the quality of democracy and tax revenue, especially in countries with strong institutions. The underlying mechanisms of this relationship include: (1) increased government accountability in public fund management, (2) strengthening of the social contract and tax legitimacy, (3) increased taxpayer participation in fiscal policy making, and (4) more transparent tax administration reforms. This study also identifies moderating factors such as the level of economic development, institutional capacity, and income inequality that affect the strength of this relationship. The implications of these findings suggest that strengthening democratic institutions and public participation in fiscal decision-making can be an important strategy for increasing tax revenue in developing countries.*

**Keywords:** Democracy, Fiscal accountability, Tax compliance, Tax revenue

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara sistem demokrasi dan penerimaan pajak melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Demokratisasi diasumsikan memiliki implikasi pada kepatuhan pajak, akuntabilitas fiskal, dan legitimasi kebijakan perpajakan, yang pada akhirnya memengaruhi total penerimaan pajak. SLR dilakukan dengan menganalisis 47 artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal terindeks Scopus dan Web of Science selama periode 2010-2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara kualitas demokrasi dan penerimaan pajak, terutama pada negara-negara dengan institusi yang kuat. Mekanisme yang mendasari hubungan ini mencakup: (1) peningkatan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan dana publik, (2) penguatan kontrak sosial dan legitimasi pajak, (3) peningkatan partisipasi wajib pajak dalam pembuatan kebijakan fiskal, dan (4) reformasi administrasi perpajakan yang lebih transparan. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor moderasi seperti tingkat pembangunan ekonomi, kapasitas institusional, dan ketimpangan pendapatan yang memengaruhi kekuatan hubungan tersebut. Implikasi dari temuan ini menyarankan bahwa penguatan institusi demokratis dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan fiskal dapat menjadi strategi penting untuk meningkatkan penerimaan pajak di negara berkembang.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas fiskal, Demokrasi, Kepatuhan pajak, Penerimaan pajak

## PENDAHULUAN

Hubungan antara sistem politik dan kinerja fiskal telah menjadi perhatian dalam literatur ekonomi politik dan keuangan publik selama beberapa dekade terakhir. Secara teoretis, demokrasi dengan karakteristik seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi warga negara dihipotesiskan dapat meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memobilisasi penerimaan domestik, terutama melalui pajak (Acemoglu & Robinson, 2019). Namun, bukti empiris mengenai hubungan ini masih beragam, dengan beberapa studi menunjukkan hubungan positif (Aidt & Jensen, 2013; Profeta et al., 2013), sementara studi lain menemukan hasil yang tidak konsisten atau bahkan negatif (Cheibub, 1998; Meltzer & Richard, 1981).

Perpajakan merupakan komponen fundamental dalam hubungan negara-masyarakat (*state-society relations*) dan kontrak sosial yang mendasari legitimasi pemerintahan (Levi, 1988; North & Weingast, 1989). Dalam konteks demokrasi, prinsip "no taxation without representation" mencerminkan gagasan bahwa kerelaan warga negara untuk membayar pajak terkait erat dengan kemampuan mereka untuk memengaruhi bagaimana sumber daya tersebut dialokasikan. Di sisi lain, penerimaan pajak yang memadai menjadi prasyarat bagi negara untuk



menyediakan barang dan jasa publik yang berkualitas, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi dan stabilitas institusi demokratis (Besley & Persson, 2013).

Mengingat pentingnya mobilisasi pendapatan domestik bagi pembangunan berkelanjutan, sebagaimana tercermin dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Agenda Addis Ababa tentang Pembiayaan Pembangunan, pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana faktor politik, khususnya demokrasi, memengaruhi kapasitas perpajakan negara menjadi sangat relevan (United Nations, 2015). Hal ini terutama penting bagi negara berkembang yang sering menghadapi tantangan dalam meningkatkan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Meskipun telah banyak studi yang mengkaji hubungan antara demokrasi dan penerimaan pajak, belum ada upaya sistematis untuk mengintegrasikan dan mensintesis temuan-temuan yang ada. Kajian literatur sebelumnya cenderung bersifat naratif dan tidak menerapkan metodologi yang sistematis dalam seleksi dan analisis literatur. Kesenjangan ini mendasari dilakukannya penelitian ini, yang bertujuan untuk melakukan *Systematic Literature Review* (SLR) tentang pengaruh demokrasi terhadap penerimaan pajak.

Penelitian ini memiliki tiga kontribusi utama. Pertama, penelitian ini menyediakan sintesis komprehensif dari literatur empiris mengenai hubungan demokrasi-perpajakan, mengidentifikasi pola-pola, inkonsistensi, dan kesenjangan dalam penelitian. Kedua, penelitian ini mengeksplorasi mekanisme kausal dan faktor-faktor kontekstual yang memoderasi hubungan tersebut. Ketiga, penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual yang dapat memandu penelitian empiris di masa depan serta memberikan implikasi kebijakan untuk penguatan mobilisasi pendapatan domestik.

Pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam kajian ini adalah: (1) Bagaimana pengaruh demokrasi terhadap penerimaan pajak berdasarkan bukti empiris yang tersedia? (2) Apa mekanisme kausal yang mendasari hubungan antara demokrasi dan penerimaan pajak? (3) Faktor-faktor kontekstual apa yang memoderasi hubungan tersebut? (4) Apa implikasi dari temuan tersebut bagi kebijakan fiskal dan reformasi perpajakan?

## KAJIAN PUSTAKA

### Kerangka Teoretis Hubungan Demokrasi dan Perpajakan

Hubungan antara sistem politik dan kinerja fiskal telah dikaji dari berbagai perspektif teoretis. Teori pilihan publik (*public choice theory*) menekankan bahwa dalam sistem demokratis, kebijakan perpajakan mencerminkan preferensi pemilih median (Meltzer & Richard, 1981). Model ini memprediksi bahwa demokratisasi akan meningkatkan permintaan akan redistribusi dan pengeluaran publik, yang pada gilirannya mendorong peningkatan penerimaan pajak.

Di sisi lain, teori ekonomi politik baru (*new political economy*) berfokus pada peranan institusi dalam membentuk insentif bagi elit politik untuk menyediakan barang publik dan memobilisasi pendapatan (Acemoglu & Robinson, 2012; Besley & Persson, 2011). Menurut perspektif ini, institusi demokratis seperti pemilihan umum yang kompetitif, kebebasan pers, dan *checks and balances* antar cabang pemerintahan menciptakan akuntabilitas yang mendorong pemimpin untuk mengadopsi kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap kepentingan publik.

Teori kontrak sosial (*social contract theory*) menekankan bahwa kesediaan warga negara untuk membayar pajak tergantung pada persepsi mereka tentang legitimasi pemerintah dan keadilan sistem perpajakan (Levi, 1988; North & Weingast, 1989). Dalam kerangka ini, demokrasi meningkatkan kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*) karena warga negara merasa memiliki suara dalam pengambilan keputusan fiskal dan dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan dana publik.



Sementara itu, perspektif kelembagaan historis (*historical institutionalism*) menekankan bahwa hubungan antara demokrasi dan perpajakan dibentuk oleh trajektori pembangunan institusional jangka panjang (Tilly, 1992). Menurut pandangan ini, kapasitas perpajakan negara berkembang melalui proses tawar-menawar antara negara dan masyarakat, di mana pengenaan pajak diimbangi dengan perluasan representasi politik—proses yang dirangkum dalam slogan "no taxation without representation" (Bates & Lien, 1985).

### Penelitian Sebelumnya

Studi empiris tentang hubungan demokrasi dan perpajakan telah menghasilkan temuan yang beragam. Beberapa penelitian menemukan bahwa demokratisasi berkorelasi positif dengan peningkatan rasio pajak terhadap PDB. Misalnya, Aidt dan Jensen (2013) menganalisis data historis dari negara-negara Eropa Barat dan menemukan bahwa perluasan hak pilih (*suffrage*) di abad ke-19 dan awal abad ke-20 berhubungan dengan peningkatan progresivitas pajak dan total penerimaan pajak. Demikian pula, Profeta et al. (2013) menggunakan data panel dari 46 negara berkembang dan negara transisi selama periode 1990-2005 dan menemukan hubungan positif antara indeks demokrasi dan penerimaan pajak langsung.

Namun, studi lain melaporkan hasil yang tidak signifikan atau bahkan negatif. Cheibub (1998) menganalisis data dari 108 negara selama periode 1970-1990 dan tidak menemukan bukti bahwa negara demokratis memiliki kapasitas perpajakan yang lebih tinggi daripada rezim otoriter. Dalam analisis yang lebih baru, Bastiaens dan Rudra (2018) menunjukkan bahwa demokrasi saja tidak cukup untuk meningkatkan mobilisasi pendapatan domestik tanpa adanya institusi yang kuat, terutama di negara-negara yang bergantung pada sumber daya alam.

Penelitian tingkat mikro juga memberikan wawasan penting. Studi-studi menggunakan eksperimen lapangan dan survei wajib pajak menunjukkan bahwa persepsi tentang kualitas pemerintahan demokratis memengaruhi kepatuhan pajak (Torgler, 2005; Alm et al., 2016). Secara khusus, transparansi dalam penggunaan dana publik, partisipasi dalam pengambilan keputusan anggaran, dan kepercayaan pada institusi politik ditemukan berkorelasi positif dengan kesediaan untuk membayar pajak.

Inkonsistensi dalam temuan empiris mungkin mencerminkan perbedaan dalam konteks negara, periode waktu, pengukuran variabel, dan spesifikasi model. Selain itu, hubungan antara demokrasi dan perpajakan kemungkinan tidak linear dan dimoderasi oleh berbagai faktor seperti tingkat pembangunan ekonomi, struktur ekonomi, kapasitas institusional, dan sejarah fiskal. Meskipun beberapa penelitian telah mencoba untuk mengatasi masalah heterogenitas ini, pendekatan yang lebih sistematis diperlukan untuk mensintesis bukti yang tersedia dan mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual yang relevan.

### Kesenjangan dalam Literatur yang Ada

Meskipun terdapat sejumlah penelitian tentang hubungan demokrasi-perpajakan, beberapa kesenjangan penting tetap ada dalam literatur. Pertama, sebagian besar studi berfokus pada hubungan langsung antara demokrasi dan total penerimaan pajak, dengan perhatian terbatas pada komposisi penerimaan pajak atau jenis pajak tertentu. Kedua, mekanisme kausal yang menghubungkan institusi demokratis dengan hasil perpajakan belum sepenuhnya dieksplorasi, dengan banyak studi memperlakukan proses yang mendasarinya sebagai "kotak hitam". Ketiga, meskipun beberapa studi mengakui pentingnya faktor-faktor kontekstual, pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan menguji efek moderasi dari variabel-variabel ini masih kurang. Keempat, sebagian besar studi mengadopsi definisi minimalis tentang demokrasi yang berfokus pada pemilihan umum, mengabaikan dimensi lain seperti kebebasan sipil, supremasi hukum, dan keterlibatan masyarakat sipil yang mungkin relevan untuk mobilisasi pendapatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan ini melalui pendekatan SLR yang komprehensif, yang tidak hanya mensintesis temuan empiris tetapi juga mengidentifikasi



mekanisme kausal, variabel moderator, dan implikasi kebijakan. Dengan melakukan ini, bertujuan untuk memberikan dasar yang lebih kuat untuk penelitian di masa depan dan pengembangan kebijakan perpajakan yang sensitif terhadap konteks politik.

## **METODE**

### **Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan-temuan dari studi empiris tentang hubungan antara demokrasi dan penerimaan pajak. SLR dipilih karena kemampuannya dalam menyediakan sintesis penelitian yang transparan, komprehensif, dan dapat direplikasi, mengurangi bias seleksi yang sering terjadi dalam tinjauan naratif tradisional (Petticrew & Roberts, 2006). Proses SLR dalam penelitian ini mengikuti pedoman PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) yang diakui secara internasional (Moher et al., 2009).

### **Strategi Pencarian**

Pencarian literatur dilakukan pada lima database elektronik utama: Scopus, Web of Science, EconLit, JSTOR, dan Google Scholar. Kombinasi istilah pencarian yang digunakan adalah: ("democracy" OR "democratic" OR "democratization" OR "political regime" OR "political system" OR "electoral competition" OR "governance" OR "accountability" OR "transparency") AND ("tax" OR "taxation" OR "tax revenue" OR "tax collection" OR "tax compliance" OR "fiscal capacity" OR "fiscal policy" OR "public finance" OR "domestic resource mobilization").

Pencarian dibatasi pada artikel yang diterbitkan dalam bahasa Inggris antara Januari 2010 dan Desember 2024 untuk memastikan cakupan literatur kontemporer yang komprehensif. Referensi dari artikel yang diidentifikasi juga ditelusuri untuk menemukan studi tambahan yang mungkin tidak terdeteksi melalui pencarian database elektronik.

### **Kriteria Inklusi dan Eksklusi**

Kriteria inklusi: (1) Studi yang secara eksplisit menganalisis hubungan antara variabel politik (khususnya demokrasi atau komponen-komponennya) dan hasil perpajakan (penerimaan pajak, kepatuhan pajak, atau kapasitas fiskal); (2) Studi empiris dengan analisis kuantitatif atau kualitatif sistematis; (3) Studi yang diterbitkan di jurnal *peer-reviewed*, buku akademik, atau *working papers* dari institusi penelitian terkemuka; dan (4) Studi dengan cakupan geografis dan konteks yang beragam (negara maju, berkembang, atau ekonomi transisi).

Kriteria eksklusi: (1) Studi yang hanya membahas aspek perpajakan atau demokrasi secara terpisah tanpa menganalisis hubungan di antara keduanya; (2) Opini, editorial, atau artikel berita; (3) Studi yang berfokus semata-mata pada aspek teknis administrasi perpajakan tanpa mempertimbangkan konteks politik; (4) Studi dengan kelemahan metodologis signifikan yang diidentifikasi selama penilaian kualitas.

### **Seleksi Studi dan Ekstraksi Data**

Proses seleksi studi terdiri dari dua tahap. Pertama, judul dan abstrak dari semua studi yang teridentifikasi diperiksa untuk menilai relevansinya terhadap pertanyaan penelitian. Kedua, teks lengkap dari studi yang lolos dari skrining awal dievaluasi terhadap kriteria inklusi dan eksklusi. Proses seleksi dilakukan oleh dua peneliti secara independen untuk mengurangi bias, dengan ketidaksepakatan diselesaikan melalui diskusi atau konsultasi dengan peneliti ketiga.

Data yang diekstraksi dari setiap studi yang memenuhi syarat meliputi: (1) Informasi bibliografi (penulis, tahun, judul, jurnal); (2) Desain penelitian (metode, periode studi, ukuran sampel); (3) Karakteristik sampel (negara/wilayah, tingkat analisis); (4) Variabel independen (ukuran demokrasi yang digunakan); (5) Variabel dependen (jenis dan ukuran hasil perpajakan);



(6) Variabel kontrol dan moderator yang dipertimbangkan; (7) Temuan utama (arah dan signifikansi hubungan); (8) Mekanisme kausal yang diidentifikasi; dan (9) Implikasi kebijakan yang diusulkan.

### **Penilaian Kualitas Studi**

Kualitas metodologis dari studi yang dimasukkan dinilai menggunakan kriteria yang diadaptasi dari *Mixed Methods Appraisal Tool* (MMAT) (Hong et al., 2018) dan *Quality Assessment Tool for Quantitative Studies* (Thomas et al., 2004). Aspek yang dinilai meliputi: (1) Kejelasan pertanyaan penelitian dan desain; (2) Kesesuaian metode pengumpulan data; (3) Representativitas sampel; (4) Validitas dan reliabilitas pengukuran; (5) Kesesuaian analisis statistik; (6) Pengendalian terhadap variabel pengganggu; (7) Kekuatan inferensi kausal; (8) Generalisabilitas temuan; dan (9) Transparansi dalam pelaporan metodologi dan hasil.

Setiap studi diberi skor kualitas (tinggi, sedang, atau rendah) berdasarkan penilaian komprehensif terhadap kriteria di atas. Studi dengan kualitas rendah tidak dikeluarkan secara otomatis, tetapi kekuatan bukti yang mereka berikan dipertimbangkan dalam sintesis.

### **Analisis dan Sintesis Data**

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan sintesis naratif terstruktur (Popay et al., 2006), yang menggabungkan elemen kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena heterogenitas dalam desain penelitian, konteks, dan ukuran hasil di antara studi yang diidentifikasi, yang membuat meta-analisis formal tidak praktis.

Sintesis dilakukan dalam beberapa tahap: (1) Organisasi studi berdasarkan desain penelitian, konteks, dan jenis hasil perpajakan yang dianalisis; (2) Identifikasi pola-pola dalam temuan empiris tentang hubungan demokrasi-perpajakan; (3) Eksplorasi faktor-faktor kontekstual yang memoderasi hubungan tersebut; (4) Analisis mekanisme kausal yang diusulkan untuk menjelaskan hubungan; (5) Integrasi temuan ke dalam kerangka konseptual koheren; (6) Identifikasi kesenjangan pengetahuan dan arah untuk penelitian masa depan.

Triangulasi metodologis dilakukan dengan membandingkan temuan dari studi kuantitatif, kualitatif, dan metode campuran untuk mengembangkan pemahaman yang lebih kaya dan nuansa tentang hubungan demokrasi-perpajakan.

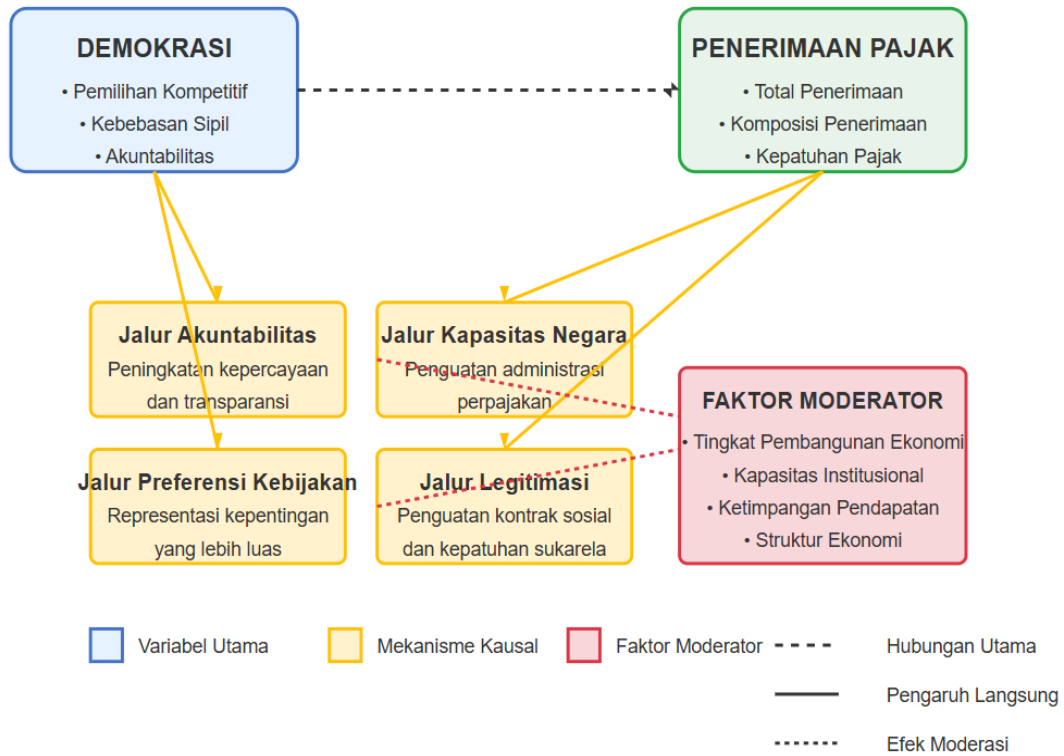
### **Kerangka Konseptual Awal**

Untuk memandu analisis, dikembangkan kerangka konseptual awal yang mengidentifikasi jalur potensial melalui mana demokrasi dapat memengaruhi penerimaan pajak. Kerangka ini didasarkan pada tinjauan pendahuluan literatur dan direvisi secara iteratif selama proses analisis berdasarkan temuan dari studi yang dimasukkan.

Kerangka konseptual awal mengidentifikasi empat jalur utama yang menghubungkan demokrasi dengan penerimaan pajak: (1) Jalur akuntabilitas: institusi demokratis meningkatkan akuntabilitas pemerintah, yang mengarah pada peningkatan kepercayaan dan kepatuhan pajak; (2) Jalur kapasitas negara: kompetisi demokratis mendorong investasi dalam kapasitas administratif negara, termasuk administrasi perpajakan; (3) Jalur preferensi kebijakan: proses demokratis memfasilitasi ekspresi preferensi publik untuk kebijakan fiskal tertentu, memengaruhi struktur dan tingkat perpajakan; dan (4) Jalur legitimasi: partisipasi demokratis meningkatkan legitimasi pengambilan keputusan fiskal, mendorong kepatuhan sukarela terhadap kewajiban pajak.



Gambar 1: Kerangka Konseptual Hubungan Demokrasi dan Penerimaan Pajak



Sumber: data diolah

Faktor-faktor kontekstual yang mungkin memoderasi jalur-jalur ini juga diidentifikasi, termasuk tingkat pembangunan ekonomi, struktur ekonomi, ketimpangan, kapasitas institusional, dan warisan historis. Kerangka ini berfungsi sebagai alat heuristik untuk mengorganisir dan menafsirkan temuan, bukan sebagai model kaku yang memaksakan kategori *a priori* pada data.

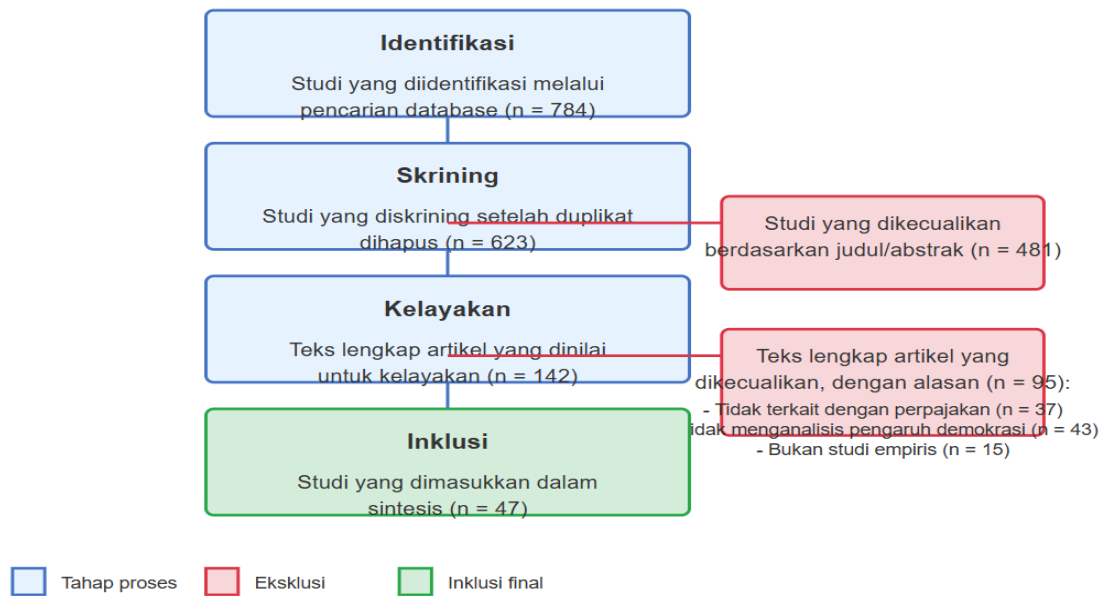
## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Studi yang Dimasukkan

Proses pencarian dan seleksi menghasilkan 47 studi yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Diagram alir PRISMA (Gambar 2) mengilustrasikan proses seleksi studi dari identifikasi awal hingga inklusi final.



Gambar 2: Diagram alir PRISMA proses seleksi studi

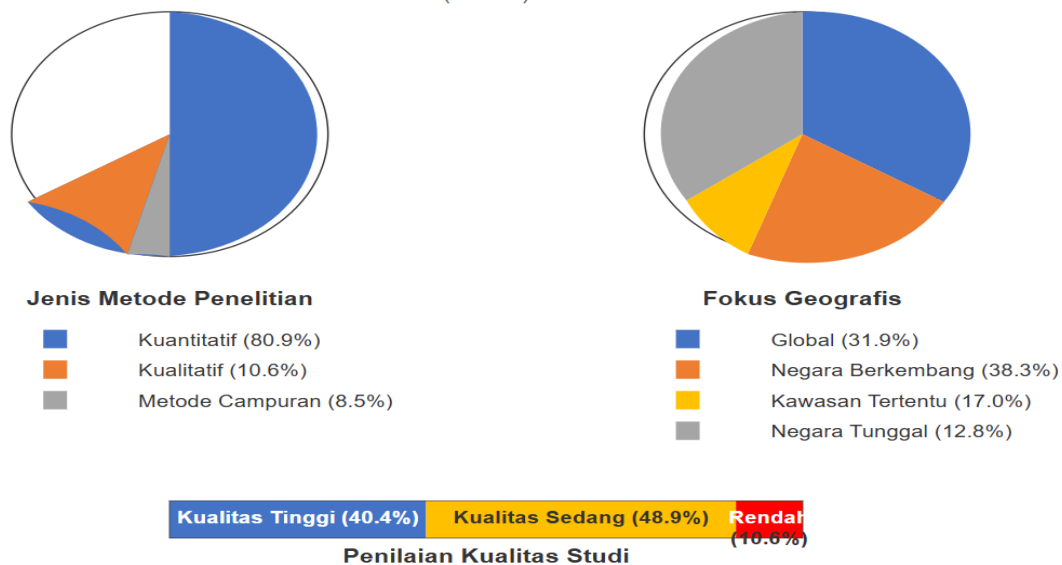


Sumber: data diolah

Dari 47 studi yang dimasukkan, 38 (80,9%) menggunakan metode kuantitatif, 5 (10,6%) menggunakan metode kualitatif, dan 4 (8,5%) mengadopsi pendekatan metode campuran. Distribusi geografis studi cukup beragam: 15 (31,9%) mencakup sampel global dari negara maju dan berkembang, 18 (38,3%) berfokus pada negara berkembang, 8 (17,0%) spesifik untuk kawasan tertentu (seperti Afrika Sub-Sahara atau Amerika Latin), dan 6 (12,8%) berfokus pada negara individual sebagai studi kasus.

Dalam hal periode waktu, mayoritas studi (68,1%) menganalisis data dari tahun 2000-an ke atas, sementara 23,4% mencakup periode yang lebih panjang mulai dari 1980-an atau 1990-an, dan 8,5% menggunakan data historis yang menjangkau abad ke-19 atau awal abad ke-20. Penilaian kualitas studi menunjukkan bahwa 19 (40,4%) dinilai berkualitas tinggi, 23 (48,9%) berkualitas sedang, dan 5 (10,6%) berkualitas rendah.

Gambar 3: Karakteristik Studi  
Karakteristik Studi yang Dimasukkan dalam SLR  
(n = 47)



Sumber: data diolah



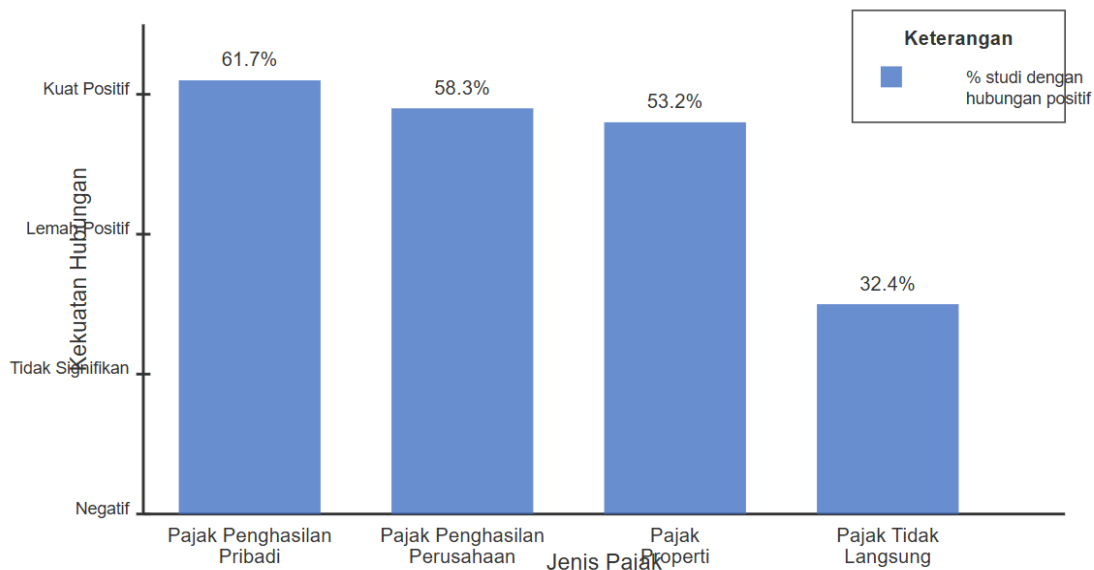
### Hubungan Empiris antara Demokrasi dan Penerimaan Pajak

Analisis dari 47 studi yang dimasukkan menunjukkan pola yang konsisten namun dengan beberapa nuansa penting. Mayoritas studi (29 dari 47, atau 61,7%) menemukan hubungan positif yang signifikan antara ukuran demokrasi dan penerimaan pajak, mendukung hipotesis bahwa institusi demokratis berkontribusi pada peningkatan mobilisasi pendapatan domestik. Namun, 12 studi (25,5%) menemukan hubungan yang tidak signifikan atau bersyarat, dan 6 studi (12,8%) melaporkan hubungan negatif.

**Gambar 4: Hubungan Demokrasi dan Penerimaan Pajak**

#### Hubungan Demokrasi dan Penerimaan Pajak Berdasarkan Jenis Pajak

(Sintesis dari 47 Studi)



Sumber: data diolah

Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa hubungan demokrasi-perpajakan bervariasi berdasarkan jenis pajak dan konteks negara. Sebuah pola yang muncul adalah bahwa demokrasi cenderung berkorelasi positif dengan pajak langsung (pajak penghasilan pribadi dan perusahaan) dan pajak properti, sementara hubungannya dengan pajak tidak langsung (pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, dan tarif) kurang konsisten. Misalnya, Gechert et al. (2019) menemukan bahwa peningkatan indeks demokrasi berkorelasi dengan kenaikan 0,5-1,0 poin persentase dalam rasio pajak penghasilan terhadap PDB di negara-negara Amerika Latin, tetapi hubungan dengan pajak konsumsi tidak signifikan.

Negara-negara dengan institusi yang kuat cenderung menunjukkan hubungan positif yang lebih kuat antara demokrasi dan penerimaan pajak. Sebaliknya, di negara-negara dengan institusi yang lemah atau yang bergantung pada sumber daya alam, hubungan tersebut sering tidak signifikan atau bahkan negatif. Temuan ini konsisten dengan argumen Besley dan Persson (2011) bahwa kapasitas fiskal membutuhkan tidak hanya institusi politik inklusif tetapi juga kapasitas administratif dan penegakan yang memadai.

Studi-studi yang menggunakan ukuran demokrasi yang lebih halus, seperti yang tidak hanya mempertimbangkan pemilihan umum tetapi juga kebebasan sipil, partisipasi politik, dan akuntabilitas, cenderung melaporkan hubungan yang lebih kuat dengan penerimaan pajak dibandingkan dengan yang menggunakan ukuran dikotomis (demokrasi vs. otoritarianisme). Hal ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan variasi dalam kualitas demokrasi, bukan hanya keberadaannya.



## **Mekanisme Kausal yang Menghubungkan Demokrasi dan Penerimaan Pajak**

Analisis dari studi yang dimasukkan mengidentifikasi beberapa mekanisme kausal utama yang menjelaskan hubungan antara demokrasi dan penerimaan pajak:

### ***Akuntabilitas dan Kepercayaan***

Mekanisme yang paling sering diidentifikasi adalah bahwa institusi demokratis meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan memperkuat hubungan timbal balik antara pembayaran pajak dan penyediaan barang publik. Beberapa studi menemukan bukti empiris bahwa ketika warga negara memiliki sarana untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah (melalui pemilihan umum, kebebasan pers, dan lembaga pengawasan independen), mereka lebih cenderung mempercayai bahwa pendapatan pajak akan digunakan secara efektif, meningkatkan kesediaan mereka untuk mematuhi kewajiban pajak (D'Arcy, 2011; Prichard, 2015).

Studi berbasis survei oleh Ali et al. (2014) di Tanzania, Uganda, Kenya, dan Afrika Selatan menemukan bahwa persepsi tentang kualitas demokrasi dan responsivitas pemerintah adalah prediktor signifikan dari sikap perpajakan dan kepatuhan yang dilaporkan sendiri. Demikian pula, studi eksperimental oleh de la Cuesta et al. (2022) menunjukkan bahwa ketika warga negara diberi kesempatan untuk menyuarakan preferensi tentang alokasi anggaran, kepatuhan pajak sukarela meningkat secara signifikan.

### ***Representasi dan Kebijakan Fiskal***

Demokrasi memfasilitasi representasi yang lebih luas dari kepentingan sosial dalam proses pembuatan kebijakan fiskal. Beberapa studi mengidentifikasi jalur di mana partisipasi demokratis mengarah pada reformasi sistem perpajakan untuk mencerminkan preferensi warga yang lebih luas, sebagai lawan dari kepentingan elit yang sempit.

Aidt et al. (2016) menunjukkan bahwa perluasan hak pilih secara historis dikaitkan dengan pergeseran dari pajak tidak langsung (yang secara proporsional membebani kelompok berpenghasilan rendah) ke pajak langsung yang lebih progresif dan peningkatan pendapatan pajak secara keseluruhan. Temuan ini sejalan dengan model teoretis Meltzer dan Richard (1981) di mana pemilih median dalam masyarakat yang tidak setara akan mendukung perpajakan progresif untuk mendanai redistribusi.

Hasil serupa ditemukan dalam studi kontemporer. Corvalan dan Pereira (2021) menemukan bukti dari panel global negara-negara bahwa transisi demokratis secara signifikan meningkatkan progresivitas perpajakan, dengan efek yang lebih kuat di negara-negara dengan ketimpangan tinggi.

### ***Reformasi Administrasi Perpajakan***

Proses demokratis sering mendorong reformasi administrasi perpajakan yang meningkatkan transparansi, mengurangi korupsi, dan meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak. Studi oleh Baskaran dan Bigsten (2013) di 31 negara Afrika Sub-Sahara menemukan bahwa demokratisasi dikaitkan dengan reformasi administrasi perpajakan yang memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan.

Tekanan yang dihasilkan dari kompetisi demokratis dan pengawasan publik dapat mendorong pemerintah untuk melakukan investasi dalam kapasitas administratif dan mengurangi kebocoran dalam sistem perpajakan. Hassan dan Prichard (2016) menunjukkan bahwa di Ghana, tekanan dari masyarakat sipil dan media yang lebih bebas setelah konsolidasi demokratis berkontribusi pada penguatan administrasi perpajakan dan pengurangan pengalihan pajak.

### ***Legitimasi dan Kontrak Sosial***

Beberapa studi menekankan peran demokrasi dalam memperkuat legitimasi perpajakan dan kontrak sosial yang mendasarinya. Proses kebijakan yang lebih inklusif dan partisipatif



meningkatkan persepsi keadilan dan legitimasi sistem perpajakan, yang pada gilirannya mendorong kepatuhan sukarela.

Levi dan Sacks (2009) menggunakan data survei dari Afrika untuk menunjukkan bahwa persepsi tentang legitimasi pemerintah secara signifikan memengaruhi kerelaan untuk membayar pajak. Demikian pula, von Haldenwang (2017) berargumen bahwa legitimasi perpajakan di negara demokratis berasal dari kepercayaan bahwa pajak adalah kontribusi yang sah untuk tujuan bersama, bukan semata-mata ekstraksi yang dipaksakan oleh negara.

Studi kasus oleh Jibao dan Prichard (2015) tentang reformasi perpajakan di Sierra Leone setelah transisi demokratis menyoroti bagaimana peningkatan partisipasi publik dalam kebijakan fiskal berkontribusi pada pengembangan "budaya pembayaran pajak" yang lebih kuat dan peningkatan legitimasi perpajakan daerah.

### Faktor Moderator yang Memengaruhi Hubungan Demokrasi-Perpajakan

Sintesis dari studi yang dianalisis mengidentifikasi beberapa faktor kontekstual kunci yang memoderasi hubungan antara demokrasi dan penerimaan pajak:

**Gambar 5: Moderator dalam Demokrasi dan Penerimaan Pajak**



Sumber: data diolah

### Tingkat Pembangunan Ekonomi

Beberapa studi menunjukkan bahwa tingkat pembangunan ekonomi secara signifikan memoderasi hubungan antara demokrasi dan penerimaan pajak. Garcia dan von Haldenwang (2016) menemukan bahwa efek positif demokrasi pada penerimaan pajak lebih kuat di negara-negara berpenghasilan menengah dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan rendah. Hal ini mungkin mencerminkan fakta bahwa kapasitas administrasi yang lebih tinggi dan ekonomi formal yang lebih besar di negara-negara berpenghasilan menengah memungkinkan pemerintah demokratis untuk lebih efektif memobilisasi pendapatan.

Untuk negara-negara berpenghasilan rendah, Yogo dan Ngo Njib (2018) menemukan bahwa efek demokrasi pada penerimaan pajak sangat bergantung pada tingkat perkembangan pasar keuangan dan keterbukaan perdagangan, dengan efek positif yang lebih kuat ketika sektor keuangan lebih berkembang.



### ***Kapasitas Institusional***

Kualitas institusi, termasuk supremasi hukum, efektivitas birokrasi, dan kontrol terhadap korupsi, secara konsisten diidentifikasi sebagai moderator kunci dari hubungan demokrasi-perpajakan. Persson dan Rothstein (2019) menekankan bahwa institusi demokratis saja tidak cukup untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa kapasitas administratif yang memadai untuk menerapkan kebijakan perpajakan.

Studi oleh Brautigam et al. (2016) di beberapa negara Afrika menunjukkan bahwa ketika kapasitas institusional rendah dan korupsi tinggi, transisi demokratis mungkin tidak menghasilkan perbaikan signifikan dalam penerimaan pajak. Sebaliknya, di negara-negara dengan kapasitas institusional yang lebih tinggi, demokrasi dan akuntabilitas yang meningkat dapat memperkuat mobilisasi pendapatan domestik.

### ***Ketimpangan Pendapatan***

Tingkat ketimpangan pendapatan telah diidentifikasi sebagai moderator penting dari hubungan demokrasi-perpajakan. Beberapa studi menunjukkan bahwa efek positif demokrasi pada penerimaan pajak lebih kuat di negara-negara dengan ketimpangan tinggi, konsisten dengan prediksi teori pemilih median. Acemoglu et al. (2015) menemukan bahwa reformasi demokratis menghasilkan peningkatan pajak progresif yang lebih besar di negara-negara dengan distribusi pendapatan yang lebih tidak merata.

Namun, moderasi melalui ketimpangan tidak selalu berjalan ke arah yang diharapkan. Di beberapa konteks, ketimpangan yang ekstrem dapat memberi elit ekonomi daya tawar yang tidak proporsional, memungkinkan mereka untuk memblokir reformasi perpajakan progresif bahkan dalam kerangka demokrasi formal (Ardanaz & Scartascini, 2013).

### ***Struktur Ekonomi dan Sumber Penerimaan***

Struktur ekonomi, terutama ketergantungan pada sumber daya alam dan ukuran sektor informal, secara signifikan memoderasi hubungan demokrasi-perpajakan. Di negara-negara yang sangat bergantung pada pendapatan sumber daya alam, demokrasi sering memiliki efek yang lebih lemah atau tidak signifikan pada penerimaan pajak non-sumber daya. Ross (2004) menunjukkan bahwa di negara-negara kaya minyak, pemerintah dapat membiayai pengeluaran publik tanpa pajak domestik yang berat, melemahkan kontrak fiskal antara negara dan warga.

Demikian pula, di ekonomi dengan sektor informal yang besar, institusi demokratis mungkin memiliki pengaruh terbatas pada penerimaan pajak formal. Joshi et al. (2014) menemukan bahwa di negara-negara dengan sektor informal yang dominan, efek demokrasi pada penerimaan pajak sering dimediasi oleh kapasitas negara untuk memperluas cakupan perpajakan ke ekonomi informal.

### ***Warisan Historis dan Trajektori Institusional***

Beberapa studi menekankan pentingnya trajektori institusional jangka panjang dan warisan kolonial dalam membentuk hubungan demokrasi-perpajakan kontemporer. Mkandawire (2010) membedakan antara negara-negara Afrika berdasarkan warisan fiskal mereka dan menunjukkan bahwa efek demokratisasi pada penerimaan pajak bervariasi berdasarkan kapasitas ekstraktif yang diturunkan dari era kolonial.

Penelitian oleh D'Arcy (2011) menggunakan pendekatan ketergantungan jalur (*path dependence*) untuk menjelaskan variasi dalam hasil perpajakan di Afrika pasca-kolonial, menunjukkan bahwa warisan institusional membatasi efektivitas reformasi demokratis kontemporer dalam meningkatkan mobilisasi pendapatan domestik.

### ***Implikasi Teoretis***

Hasil kajian ini mendukung pandangan bahwa hubungan antara demokrasi dan perpajakan bersifat kontingensi dan kontekstual, daripada universal dan deterministik. Hubungan ini dimediasi oleh berbagai mekanisme institusional dan dimoderasi oleh konteks sosio-ekonomi dan historis yang lebih luas.



Temuan penelitian juga menyoroti keterbatasan teori-teori yang ada. Model pemilih median Meltzer-Richard, misalnya, berhasil menjelaskan hubungan demokrasi-perpajakan di beberapa konteks tetapi kurang berhasil di negara-negara dengan ketimpangan ekstrem atau kapasitas institusional yang lemah. Demikian pula, teori kontrak sosial perlu memperhitungkan variasi substansial dalam bagaimana proses demokratis membentuk persepsi tentang legitimasi perpajakan di berbagai konteks.

Hasil kajian menunjukkan kebutuhan akan kerangka teoretis yang lebih terintegrasi yang menggabungkan wawasan dari ekonomi politik, sosiologi fiskal, dan studi ketergantungan jalur untuk lebih baik menjelaskan variasi dalam hubungan demokrasi-perpajakan di negara-negara dengan tingkat pembangunan dan latar belakang institusional yang berbeda.

### **Implikasi Kebijakan**

**Pendekatan holistik untuk reformasi perpajakan:** Reformasi perpajakan harus mengatasi tidak hanya aspek teknis administrasi pajak tetapi juga dimensi politik dan sosial kepatuhan pajak. Ini termasuk memperkuat hubungan antara pembayaran pajak dan penyediaan layanan, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pendapatan, dan membangun kepercayaan antara wajib pajak dan otoritas pajak.

**Penguatan institusi pendukung:** Demokratisasi perlu didukung oleh investasi paralel dalam kapasitas institusional untuk memaksimalkan dampak positifnya pada penerimaan pajak. Ini termasuk memperkuat supremasi hukum, mengurangi korupsi, dan meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan.

**Partisipasi dalam pembuatan kebijakan fiskal:** Mekanisme untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses anggaran, seperti anggaran partisipatif dan forum konsultasi pemangku kepentingan pajak, dapat memperkuat legitimasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela.

**Strategi yang disesuaikan dengan konteks:** Strategi mobilisasi pendapatan domestik harus disesuaikan dengan kondisi kontekstual tertentu, termasuk tingkat pembangunan ekonomi, kapasitas institusional, struktur ekonomi, dan warisan fiskal historis.

**Fokus pada pajak langsung dan progresif:** Di negara-negara demokratis dengan ketimpangan tinggi, fokus pada memperkuat sistem pajak langsung (pajak penghasilan pribadi dan perusahaan, pajak properti) dapat menghasilkan manfaat ganda meningkatkan pendapatan dan mengurangi kesenjangan.

**Reformasi bertahap:** Dalam konteks dengan kapasitas terbatas atau ketidakpercayaan yang kuat terhadap pemerintah, pendekatan bertahap untuk reformasi perpajakan mungkin lebih efektif, dengan fokus awal pada penguatan institusi pendukung dan membangun kepercayaan sebelum melaksanakan perubahan kebijakan yang lebih ambisius.

### **PENUTUP**

Kajian sistematis ini telah meneliti bukti empiris tentang hubungan antara demokrasi dan penerimaan pajak, mengidentifikasi mekanisme kausal yang mendasarinya, dan menganalisis faktor-faktor kontekstual yang memoderasi hubungan tersebut. Sintesis dari 47 studi yang memenuhi kriteria inklusi menunjukkan bahwa meskipun mayoritas studi menemukan hubungan positif antara demokrasi dan penerimaan pajak, kekuatan dan signifikansi hubungan ini bervariasi berdasarkan jenis pajak, konteks negara, dan pengukuran demokrasi yang digunakan.

Beberapa mekanisme kausal utama yang menghubungkan demokrasi dan perpajakan telah diidentifikasi: 1) peningkatan akuntabilitas pemerintah dan kepercayaan warga negara, 2) representasi yang lebih luas dari kepentingan sosial dalam pembuatan kebijakan fiskal, 3) dorongan untuk reformasi administrasi perpajakan, dan 4) penguatan legitimasi perpajakan dan kontrak sosial yang mendasarinya. Efektivitas mekanisme ini dimoderasi oleh faktor-faktor



kontekstual termasuk tingkat pembangunan ekonomi, kapasitas institusional, ketimpangan pendapatan, struktur ekonomi, dan warisan historis.

Temuan ini memiliki implikasi penting untuk teori dan kebijakan. Secara teoretis, mereka menyoroti kompleksitas dan kontingensi hubungan demokrasi-perpajakan, menantang model deterministik sederhana dan menekankan kebutuhan akan kerangka kerja integratif yang menggabungkan wawasan dari berbagai tradisi ilmiah. Secara praktis, mereka menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan mobilisasi pendapatan domestik melalui demokratisasi harus mempertimbangkan konteks institusional dan sosio-ekonomi yang lebih luas dan dilengkapi dengan investasi dalam kapasitas negara, akuntabilitas, dan legitimasi.

### **Keterbatasan dan Arah Penelitian Masa Depan**

Meskipun komprehensif, kajian ini memiliki beberapa keterbatasan. Karena heterogenitas dalam desain penelitian, konteks, dan ukuran hasil di antara studi yang dimasukkan, meta-analisis formal tidak praktis, membatasi kemampuan untuk menghitung ukuran efek secara tepat. Selain itu, sebagian besar studi yang dimasukkan mengukur demokrasi dengan cara yang relatif sederhana dan mungkin tidak menangkap nuansa dalam kualitas institusi demokratis.

Berdasarkan sintesis ini, dapat diidentifikasi beberapa arah prioritas untuk penelitian masa depan: (1) **Mekanisme mikro**: Diperlukan lebih banyak penelitian tingkat mikro tentang bagaimana warga negara mengalami dan merespons institusi demokratis dalam konteks keputusan kepatuhan pajak mereka, idenya menggunakan kombinasi survei, eksperimen, dan etnografi fiskal. (2) **Dimensi dan kualitas demokrasi**: Studi masa depan harus mengadopsi pengukuran demokrasi yang lebih halus yang memperhitungkan berbagai dimensi (elektoral, liberal, deliberatif, partisipatif) dan kualitasnya, bukan hanya adanya pemilihan. (3) **Komposisi penerimaan pajak**: Lebih banyak perhatian harus diberikan pada bagaimana demokrasi memengaruhi komposisi penerimaan pajak (langsung vs. tidak langsung, progresif vs. regresif) daripada hanya total penerimaan. (4) **Moderator kontekstual**: Diperlukan eksplorasi sistematis tentang bagaimana faktor kontekstual seperti ketimpangan, kapasitas negara, dan ketergantungan sumber daya berinteraksi dengan institusi demokratis untuk membentuk hasil perpajakan. (5) **Penelitian longitudinal**: Studi longitudinal yang mengikuti negara-negara melalui transisi demokratis dari waktu ke waktu akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang dinamika jangka panjang dari hubungan demokrasi-perpajakan.

Terakhir, masa depan perpajakan dalam ekonomi digital yang semakin global memerlukan penelitian tentang bagaimana demokrasi membentuk tanggapan kebijakan nasional terhadap tantangan seperti mobilitas basis pajak, erosi basis pajak dan pengalihan laba (BEPS), dan perpajakan perusahaan multinasional teknologi. Memahami bagaimana konteks politik memengaruhi kapasitas negara untuk beradaptasi dengan lingkungan perpajakan yang berubah akan menjadi semakin penting bagi mobilisasi pendapatan domestik yang efektif dan berkelanjutan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Acemoglu, D., Naidu, S., Restrepo, P., & Robinson, J. A. (2015). Democracy, redistribution, and inequality. In *Handbook of income distribution* (Vol. 2, pp. 1885-1966). Elsevier.
- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown Business.
- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2019). *The narrow corridor: States, societies, and the fate of liberty*. Penguin Books.
- Aidt, T. S., & Jensen, P. S. (2013). Democratization and the size of government: Evidence from the long 19th century. *Public Choice*, 157(3-4), 511-542.



- Aidt, T. S., Dutta, J., & Loukoianova, E. (2006). Democracy comes to Europe: Franchise extension and fiscal outcomes 1830–1938. *European Economic Review*, 50(2), 249-283.
- Ali, M., Fjeldstad, O. H., & Sjursen, I. H. (2014). To pay or not to pay? Citizens' attitudes toward taxation in Kenya, Tanzania, Uganda, and South Africa. *World Development*, 64, 828-842.
- Alm, J., Bernasconi, M., Laury, S., Lee, D. J., & Wallace, S. (2016). Culture, compliance, and confidentiality: Taxpayer behavior in the United States and Italy. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 124, 216-233.
- Ardanaz, M., & Scartascini, C. (2013). Inequality and personal income taxation: The origins and effects of legislative malapportionment. *Comparative Political Studies*, 46(12), 1636-1663.
- Baskaran, T., & Bigsten, A. (2013). Fiscal capacity and the quality of government in sub-Saharan Africa. *World Development*, 45, 92-107.
- Bastiaens, I., & Rudra, N. (2018). *Democracies in peril: Taxation and redistribution in globalizing economies*. Cambridge University Press.
- Bates, R. H., & Lien, D. H. (1985). A note on taxation, development, and representative government. *Politics & Society*, 14(1), 53-70.
- Besley, T., & Persson, T. (2011). *Pillars of prosperity: The political economics of development clusters*. Princeton University Press.
- Besley, T., & Persson, T. (2013). Taxation and development. In *Handbook of public economics* (Vol. 5, pp. 51-110). Elsevier.
- Brautigam, D., Fjeldstad, O. H., & Moore, M. (Eds.). (2016). *Taxation and state-building in developing countries: Capacity and consent*. Cambridge University Press.
- Cheibub, J. A. (1998). Political regimes and the extractive capacity of governments: Taxation in democracies and dictatorships. *World Politics*, 50(3), 349-376.
- Corvalan, A., & Pereira, M. (2021). Democracy and taxation: How political institutions affect fiscal capacity. *Journal of Comparative Economics*, 49(3), 748-771.
- D'Arcy, M. (2011). Why do citizens assent to pay tax? Legitimacy, taxation, and the African state. Afrobarometer Working Paper No. 126.
- de la Cuesta, B., Milner, H. V., Nielson, D. L., & Knack, S. (2022). Oil discoveries, civil conflict, and direct taxation: Evidence from Nigeria. *Journal of Politics*, 84(1), 356-373.
- Garcia, M. M., & von Haldenwang, C. (2016). Do democracies tax more? Political regime type and taxation. *Journal of International Development*, 28(4), 485-506.
- Gechert, S., Rietzler, K., & Tober, S. (2019). The German minimum wage: Effects on productivity, profitability, and investments. *Wirtschaftsdienst*, 99(5), 307-313.
- Hassan, M., & Prichard, W. (2016). The political economy of domestic tax reform in Bangladesh: Political settlements, informal institutions and the negotiation of reform. *The Journal of Development Studies*, 52(12), 1704-1721.
- Hong, Q. N., Pluye, P., Fàbregues, S., Bartlett, G., Boardman, F., Cargo, M., ... & Vedel, I. (2018). Mixed methods appraisal tool (MMAT), version 2018. Registration of copyright, 1148552, 10.
- Jibao, S. S., & Prichard, W. (2015). The political economy of property tax in Africa: Explaining reform outcomes in Sierra Leone. *African Affairs*, 114(456), 404-431.
- Joshi, A., Prichard, W., & Heady, C. (2014). Taxing the informal economy: The current state of knowledge and agendas for future research. *The Journal of Development Studies*, 50(10), 1325-1347.
- Levi, M. (1988). *Of rule and revenue*. University of California Press.
- Levi, M., & Sacks, A. (2009). Legitimizing beliefs: Sources and indicators. *Regulation & Governance*, 3(4), 311-333.



- Meltzer, A. H., & Richard, S. F. (1981). A rational theory of the size of government. *Journal of Political Economy*, 89(5), 914-927.
- Mkandawire, T. (2010). On tax efforts and colonial heritage in Africa. *The Journal of Development Studies*, 46(10), 1647-1669.
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. *Annals of Internal Medicine*, 151(4), 264-269.
- North, D. C., & Weingast, B. R. (1989). Constitutions and commitment: the evolution of institutions governing public choice in seventeenth-century England. *The Journal of Economic History*, 49(4), 803-832.
- Persson, A., & Rothstein, B. (2019). Lost in transformation: A critical analysis of economic reform in Ukraine. *New Political Economy*, 24(6), 831-847.
- Petticrew, M., & Roberts, H. (2006). *Systematic reviews in the social sciences: A practical guide*. John Wiley & Sons.
- Popay, J., Roberts, H., Sowden, A., Petticrew, M., Arai, L., Rodgers, M., ... & Duffy, S. (2006). *Guidance on the conduct of narrative synthesis in systematic reviews. A product from the ESRC methods programme Version, 1, b92*.
- Prichard, W. (2015). *Taxation, responsiveness and accountability in Sub-Saharan Africa: the dynamics of tax bargaining*. Cambridge University Press.
- Profeta, P., Puglisi, R., & Scabrosetti, S. (2013). Does democracy affect taxation and government spending? Evidence from developing countries. *Journal of Comparative Economics*, 41(3), 684-718.
- Ross, M. L. (2004). Does taxation lead to representation? *British Journal of Political Science*, 34(2), 229-249.
- Thomas, B. H., Ciliska, D., Dobbins, M., & Micucci, S. (2004). A process for systematically reviewing the literature: providing the research evidence for public health nursing interventions. *Worldviews on Evidence-Based Nursing*, 1(3), 176-184.
- Tilly, C. (1992). *Coercion, capital, and European states, AD 990-1992*. Blackwell.
- Torgler, B. (2005). Tax morale in Latin America. *Public Choice*, 122(1-2), 133-157.
- United Nations. (2015). *Addis Ababa action agenda of the third international conference on financing for development*. United Nations.
- von Haldenwang, C. (2017). The political cost of local revenue mobilisation: Decentralisation of the property tax in Indonesia. *Public Finance and Management*, 17(2), 124-151.
- Yogo, U. T., & Ngo Njib, M. (2018). Political competition and tax revenues in developing countries. *Journal of International Development*, 30(2), 302-322.